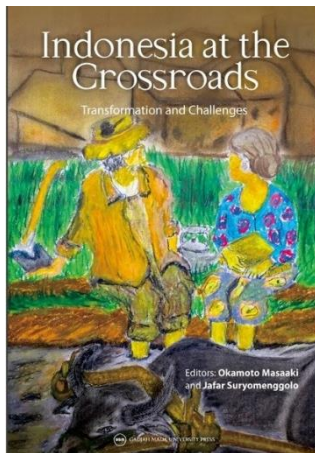


Indonesia at The Crossroads Transformation and Challenges



Judul: Indonesia at The Crossroads: Transformation and Challenges

Penulis: Abdul Wahid Fajar Amin, Adnan Topan Husodo, Asep Suharyadi, Brigitta Isabella, Cecilia Marlina, Diandra Megaputri Mengko, Ernoiz Antriandarti, Kayane Yuka, Latif Adam, Maxencius Tri Sambodo, Muhammad Haripin, Okamoto Masaaki, Rosita Dewi, Suh Jiwon, Jafar Suryomenggolo, Susi Wuri Ani, Thung Ju Lan

Editor: Okamoto Masaaki; Jafar Suryomenggolo

Penerbit: Gadjah Mada University Press; Kyoto University Press; Trans Pacific Press

Cetakan Pertama: 2022

ISBN: 978-623-359-108-9

Pasca reformasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan transformasi terkait isu sosial dan ekonomi. Reformasi politik dan krisis ekonomi yang melanda beberapa negara pada akhir 1990 turut memengaruhi transformasi paradigma administrasi publik dari *new public management* menuju *new public service* yang lebih partisipatif dan demokratis. Dalam konteks Indonesia, pandangan beberapa ahli terkait demokrasi pasca 1998 sangat beragam. Dalam beberapa aspek, demokrasi dianggap berhasil dari segi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nilai-nilai pluralisme. Di sisi lain, beberapa ahli berpandangan bahwa demokrasi masih dianggap gagal yang terlihat dari tajamnya ketimpangan pendapatan dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan riset-riset yang dilakukan penulis berperspektif Asia, disajikan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari akademisi, namun juga dari mereka yang berpengalaman dalam birokrasi dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Buku ini menjadi sumber informasi yang berharga, memperluas pemahaman tentang isu-isu penting yang sering terabaikan dalam perumusan kebijakan publik.

Buku ini terdiri dari tiga bagian dan 12 subbagian. Bagian pertama, pemerintahan dan dinamika sosial membagi pembahasannya tentang multikulturalisme dan keberagaman agama; lanskap urban pasca reformasi yang dapat menjelaskan suara aras bawah; intoleransi beragama; dan pengakuan Papua. Multikulturalisme dapat memengaruhi dinamika migrasi dan kepentingan politik. Namun, multikulturalisme dapat menjadi instrumen kesatuan.

Penulis subbagian pertama, Thung Ju Lan menggarisbawahi dualisme mayoritas dan minoritas perlu dikurangi. Sebaliknya, pembuat kebijakan perlu mulai memikirkan jalan untuk memastikan kesetaraan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga dalam kemajemukan. Subbagian berikutnya menyajikan kontestasi kepentingan, relasi patron-klien, nilai-nilai partisipan yang berbeda-beda, bahkan pesan-pesan intoleransi di Yogyakarta yang terekspresikan melalui seni jalanan atau *street art* pada ruang publik. Subbagian tersebut menggambarkan bahwa sensor karya seni tidak lagi dilakukan oleh negara saja namun juga perusahaan, preman, elit, seniman, kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat. Tantangan selanjutnya bagi pembuat kebijakan yakni memastikan ruang publik aman bagi semua warga dengan penentuan kepemilikan ruang publik yang setara dan demokratis. Subbagian terakhir pada bagian pemerintahan dan dinamika sosial mengungkap isu lama yang sering muncul saat tahun politik yakni intoleransi antaragama. Agama merupakan isu sensitif yang rentan memengaruhi elektabilitas seorang calon baik dalam legislatif maupun

eksekutif. Penulis mengungkapkan data bahwa kekerasan pada kelompok minoritas dapat terjadi terutama jika didukung oleh elit politik dan birokrasi. Meski demikian, dukungan terhadap persekusi tersebut berada di tingkat lokal, tidak di kota-kota besar lainnya. Maka itu, kunci dalam menanggulangi kekerasan antaragama yakni melalui reformasi struktur kewenangan.

Subbagian berikutnya mengevaluasi dampak Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang disebut penulisnya, Rosita Dewi, sebagai Papuanisasi. Papuanisasi meredistribusi kewenangan pada posisi politik lokal dari pemerintah pusat kepada masyarakat adat Papua. Kebijakan serupa pernah diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda pada masa perang dunia kedua yang kemudian kurang dapat merepresentasikan suara Papua. Sebab, banyak posisi dalam birokrasi yang justru dijabat oleh para pendatang. Kini, penulis mencatat bahwa Papuanisasi menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan ini termasuk kesulitan dalam mendefinisikan siapa yang merupakan orang Papua, perselisihan terkait partisipasi, fragmentasi antara Papua dan Papua Barat, berkurangnya peran kepala adat sebab pengambilan keputusan yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan posisi birokrasi yang banyak diisi penduduk dari Jawa. Tantangan-tantangan tersebut memicu ketidakpercayaan warga Papua dan gerakan separatis. Pada pungkas tulisan, penulis menekankan betapa pentingnya membangun kepercayaan masyarakat adat sebagai langkah kunci untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

Bagian berikutnya yakni jalan panjang menuju kesetaraan. Pada subbagian pertama, buku ini menyajikan data empiris mengenai luaran pendidikan pasca desentralisasi di Indonesia. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat hingga 20% lebih dari tahun 1970 hingga pertengahan 1990, dan terus meningkat hingga 2013, angka putus sekolah pun tinggi. Penulis subbagian ini, Abdul Wahid Fajar Amin, mengungkapkan pengeluaran rumah tangga, jumlah sekolah, jarak ke sekolah, dan kebijakan sekolah gratis telah meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Restrukturisasi sekolah dan perluasan sekolah juga menjadi faktor paling berpengaruh pada angka partisipasi sekolah. Disparitas partisipasi sekolah antar daerah dan gender juga ditemukan penulis. Catatan menarik yang diungkap penulis yang jarang terungkap pada data statistik yakni pengeluaran rumah tangga, persepsi terhadap pendidikan, dan latar belakang budaya suatu keluarga memengaruhi angka partisipasi sekolah. Hal menarik lainnya yakni kebijakan sekolah gratis perlu dilakukan bersama dengan ekspansi dan restrukturisasi sekolah serta mengurangi jarak antara rumah dan sekolah.

Pada subbagian berikutnya, Asep Suharyadi, membahas dinamika kemiskinan perkotaan. Meski studi-studi sebelumnya mengungkap bahwa pertumbuhan pendapatan di perkotaan berlangsung cepat, ketimpangan pendapatan pun tinggi. Maka dukungan kebijakan perlu diberikan seperti memperluas kesempatan kerja dan subsidi perumahan. Namun, apakah kebijakan kemiskinan pada daerah pedesaan dan ibukota perlu disamakan? Asep Suharyadi mengindikasikan keluaran kebijakan pengurangan kemiskinan nasional kurang efektif di Jabodetabek dibandingkan daerah lain. Sebab, pada partisipasi sekolah, akses air minum, sektor ketenagakerjaan, dan status ketenagakerjaan di Jabodetabek berbeda dengan daerah kebanyakan di Indonesia. Akses air minum tidak memiliki korelasi dengan kemiskinan di Jabodetabek, tidak seperti daerah lainnya. Pendidikan tersier seperti vokasi memiliki dampak tertinggi bagi pengurangan kemiskinan di Jabodetabek. Hal yang sama juga direkomendasikan penulis yakni meningkatkan akses teknologi, informasi, dan komunikasi. Sektor yang berkontribusi di Jabodetabek juga tercatat pada sektor perdagangan, bukan manufaktur seperti daerah lainnya. Maka itu, penulis merekomendasikan penanganan kemiskinan selayaknya dilakukan secara kontekstual berbasis data-data empiris pada faktor yang memengaruhi kemiskinan pada daerah tertentu secara signifikan.

Pada subbagian berikutnya, Ernoiz dan Susi Wuri Ani, menyajikan pentingnya perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan daya saing pertanian Indonesia. Beberapa strategi yang ditawarkan para penulis yakni menciptakan lapangan pekerjaan di luar pertanian bagi pemilik lahan, serta mendorong petani kecil untuk menyewa lahan dan mengembangkan lahan dari pemilik lahan. Sehingga, penghasilan petani dapat meningkat.

Faktor krusial yang berkontribusi pada ketimpangan pembangunan berikutnya yakni akses infrastruktur. Pada subbagian lain, Maxencius Tri Sambodo dan Latif Adam mengungkap kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur merupakan peluang baik. Meski demikian, dalam pelaksanaannya jenis kerjasama tersebut terkendala dukungan institusional yang berbelit dan tumpang tindih. Padahal, keberlanjutan penganggaran pada penyediaan infrastruktur perlu dipastikan keberlanjutannya. Beberapa rekomendasi dalam pendanaan infrastruktur dari penulis yakni: partisipasi perbankan dan sinergitas dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperluas pengeluaran fiskal untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif, penjaminan regulasi yang mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur, menghilangkan resiko investasi dari anggaran pemerintah.

Pada pungkas bagian buku ini yakni tantangan struktural, para penulis menyajikan inisiasi pemberantasan korupsi dan kepastian keamanan dan ketertiban yang telah ditempuh. Tuntutan publik dan internasional menstimulasi reformasi struktural dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Meski beberapa lembaga telah lahir seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Informasi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kinerja lembaga-lembaga tersebut menurut penulis belum dapat memberikan gambaran pasti pada penegakan hukum. Sebab, menurut penulis, komitmen yang kurang dan kontestasi kepentingan politik dalam penegakan hukum. Kritik yang sama juga disampaikan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kala pelanggaran HAM juga terkait rezim dan kepentingan politik. Catatan akhir dari bagian ini menyentuh peran badan intelijen dalam pengurangan tindakan terorisme yang memerlukan koordinasi kewenangan lebih lanjut dalam penyediaan informasi, penanganan, dan pencegahan terorisme.

Pembahasan buku ini cukup runut dan memberikan perspektif yang seimbang antara tantangan dan rekomendasi kebijakan pada sisi pemerintahan, kesetaraan, dan reformasi struktural. Buku ini dapat menyajikan sudut pandang praktis tidak hanya bagi praktisi kebijakan, namun juga akademisi. Para editor merekomendasikan penciptaan lingkungan yang mendukung bagi investasi dan deregulasi kebijakan ketenagakerjaan diperlukan pada agenda reformasi selanjutnya. Meski demikian, buku ini belum menyajikan perspektif reformasi kebijakan untuk keberlanjutan lingkungan selanjutnya. Keberlanjutan lingkungan tentu beririsan dengan pertanian dan pertanahan yang merupakan salah satu sektor penentu keunggulan kompetitif Indonesia. Keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang krusial yang juga akan berpengaruh pada inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa ilmuwan sosial dan ekonomi menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan lingkungan namun cenderung mengesampingkan dampaknya. Bagi para periset dan pemerhati isu demokrasi, agenda riset selanjutnya dapat berupa reformasi kebijakan keberlanjutan lingkungan dan aspek-aspek budaya yang menentukan perilaku pengeluaran, perspektif pendidikan, dan keamanan.

Penulis: Pratiwi (Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional)

